



EDITORIAL:

Sustainable Development Goals

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs atau *Milennium Development Goals*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Bulan September 2015 meluncurkan SDGs atau *Sustainable Development Goals* yang berlaku sampai dengan tahun 2030. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara dan berlaku bagi seluruh bangsa di dunia tanpa terkecuali. SDGs sebagai agenda pembangunan berkelanjutan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan yang mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang lebih baik. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*".

Jika sebelumnya MDGs memiliki 8 tujuan yang ingin dicapai masyarakat global, antara lain; 1) Menangulangi kemiskinan dan kelaparan, 2) Mencapai pendidikan dasar secara universal, 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) Menurunkan angka kematian anak, 5) Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya, 7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup, 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 capaian atau target yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia, antara lain; 1) Tanpa kemiskinan, 2) Tanpa kelaparan 3) Kehidupan Sehat dan

Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesetaraan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, 13) Penangan Perubahan Iklim, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan, 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Hirauan terhadap SDGs menjadi tema khusus dalam penerbitan e-jurnal *Intermestic* Volume 3, Nomor 1 kali ini. Tiga dari 17 Tujuan SDGs ini menjadi fokus bahasan artikel para kontributor penulis, yaitu Tujuan nomor 05, Tujuan nomor 07 dan Tujuan nomor 09.

Tujuan SDGs nomor 05, yakni Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Tujuan ini memiliki 9 target yang ingin dicapai secara global. Tujuan 05 berbicara tentang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Caranya adalah pengupayaan ragam cara tercapainya kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan (dewasa dan anak gadis). Berdasarkan fakta di dunia bahwa masih banyak ragam bentuk kekerasan terhadap perempuan (fisik, seksual, emosional, ekonomi) baik di ranah privat maupun ranah publik selama hidupnya, khususnya di negara-negara berkembang ketimbang di negara-negara maju. Kekerasan ini menyebabkan ketertinggalan dan ketidaksetaraan perempuan dalam pembangunan dibandingkan tidak hanya daripada kemajuan kaum lelaki tetapi juga daripada keberdayaan kaum perempuan sendiri di negara yang lebih maju.

Salah satu permasalahan yang dihadapi perempuan dalam pembangunan pada umumnya dan menjadi hirauan Tujuan 05 SDGs adalah apa yang disebut dengan '*glass ceiling*'. *Glass ceiling* (langit-langit kaca) adalah metafora yang mengacu pada penghalang buatan yang mencegah perempuan dan minoritas untuk dipromosikan ke posisi manajerial dan eksekutif dalam suatu organisasi. Parafrasa langit-langit kaca digunakan untuk menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh perempuan ketika mencoba untuk pindah ke peran yang lebih tinggi dalam hierarki yang didominasi laki-

laki. Pada umumnya kendala bagi perempuan bukan dari kebijakan yang tertulis melainkan melalui norma-norma yang diterima dan bias secara implisit. Meskipun bias gender yang diterima sebagai norma seperti itu tampak terdapat di mana saja di seluruh dunia, namun gender yang berbasis konstruksi budaya memungkinkan terdapatnya perbedaan tersendiri di setiap wilayah, salah satunya di negara Filipina.

Seperti paparan dari hasil penelitian yang ditulis oleh Michael Earl B. Castroverde dari Filipina dalam artikel berjudul “*A Crack in the Glass Ceiling: A Study on Promotion Bias to Top-level Management Positions Associated with Diversity Management in Tacloban Academes*”. Castroverde menyatakan bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama untuk bekerja dan bahwa setiap tindakan diskriminasi yang diambil terhadap karyawan perempuan karena seksnya adalah pelanggaran Undang-Undang Republik Filipina 6725. Meskipun terdapat klaim penghapusan “*glass ceiling*”, namun dari 100 lembaga pendidikan di Kota Tacloban yang telah diamati secara konsisten, sebagian besar pemimpin pendidikannya adalah laki-laki meskipun memiliki mayoritas pendidikannya adalah perempuan. Kenyataan ini menciptakan perspektif yang bias pada citra pendidikan dan merupakan indikasi diskriminasi gender yang mengkhawatirkan untuk posisi yang berbayar tinggi. Castroverde dalam artikelnya menyebut tujuan penelitiannya adalah untuk menemukan masih ada atau tidaknya “*the glass ceiling*” di salah satu lingkungan kerja utama di Visayas Timur, Kota Tacloban; serta untuk mendapatkan wawasan tentang salah satu penyebabnya, terkait Manajemen Keragaman Tenaga Kerja yang tidak efektif. Penelitiannya menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur untuk mengumpulkan data dengan Pengukuran Tendensi Sentral (*the Measures of Central Tendency*) untuk memastikan keberadaan, dalam periode 10 tahun, dalam hal (1) ketidakadilan upah antara laki-laki dan perempuan dan (2) frekuensi manajer tingkat atas perempuan. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa 1 dari 3 manajer tingkat atas di lembaga pendidikan di Tacloban, adalah perempuan; dengan 90% diposisikan di sekolah berbiaya rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa diskriminasi gender dalam pekerjaan ini berasal dari salah satu dari pendekatan organisasi terhadap keragaman. Artikel penelitian yang ditulis oleh Michael Earl B. Castroverde dari Filipina ini memberikan informasi sekaligus pemahaman bahwa hambatan “*glass ceiling*” bagi perempuan setipis apapun masih ada.

Artikel ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Filipina dalam mewujudkan capaian Tujuan 05 SDGs, khususnya di lembaga pendidikan tersebut.

Tujuan SDGs nomor 07 menjadi tema bahasan berikutnya. Tujuan 07 SDGs adalah memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Tujuan ini terdiri dari 7 target dan sangat penting karena terkait dengan tujuan-tujuan SDGs lainnya. Energi sangat diperlukan bagi hampir setiap tantangan dan peluang utama yang dihadapi dunia saat ini. Akses ke energi, baik itu untuk pekerjaan, keamanan, perubahan iklim, produksi makanan atau peningkatan pendapatan, sangat penting. Sampai saat ini banyak orang di seluruh dunia, khususnya di negara-negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang terkungkung daratan, yang tidak memiliki akses ke solusi memasak yang bersih, bebas dari polusi udara yang berbahaya, maupun kegiatan pemborosan energi. Selain itu, masih cukup banyak penduduk dunia yang berfungsi atau beraktivitas tanpa listrik. Perluasan akses ke listrik, bahan bakar dan teknologi yang bersih, serta meningkatkan efisiensi energi dan pangsa energi terbarukan memerlukan kerja sama antarnegara. Oleh karena itu, sangat penting kesediaan negara-negara untuk merangkul teknologi baru dan memperbanyak kerja sama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap riset dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih maju dan bersih, dan mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih. Semua kemajuan di semua bidang ini dibutuhkan untuk mencapai Tujuan pada tahun 2030.

Terkait dengan Tujuan SDGs nomor 7, khususnya mengenai kerja sama antarnegara dalam permasalahan energi dibahas dalam artikel berjudul “*Asean-U.S Cooperation on Renewable Energy: Asean’s Response to Climate Change Phenomenon*” oleh Dewi Agha Putri. Diawali dengan fenomena perubahan iklim yang telah menjadi salah satu isu terbanyak diperbincangkan dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). ASEAN sebagai salah satu organisasi kawasan yang paling berpengaruh berusaha untuk memerangi perubahan iklim dengan pengembangan energi terbarukan dan penciptaan standar kehidupan di dalam wilayahnya. Untuk menggapai ambisi ini, ASEAN bekerjasama dengan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu mitra dialog ASEAN dalam implementasi ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation

(APAEC) 2016-2025. Dewi Agha Putri berusaha menjelaskan bagaimana kooperasi ASEAN-AS membantu ASEAN untuk memerangi perubahan iklim tersebut dengan bekerja sama dalam hal energi terbarukan, perencanaan investasi, serta pertukaran teknologi dan informasi.

Tujuan SDGs yang menjadi tema artikel selanjutnya dan terakhir dalam penerbitan kali ini adalah Tujuan nomor 09. Tujuan 09 SDGs berkaitan dengan Industri, Inovasi dan Infrastruktur dan memiliki 9 target. Pada intinya adalah membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan penelitian dan inovasi di negara-negara berkembang, dan secara signifikan meningkatkan akses informasi dan teknologi komunikasi, menyediakan akses universal dan terjangkau ke internet di negara-negara berkembang pada tahun 2020. Upaya yang dapat dilakukan negara-negara berkembang untuk menjadi negara maju yang setara adalah melakukan pembangunan yang terencana dan menyeluruh, khususnya bagi negara kepulauan atau yang memiliki hambatan topografi. Salah satunya yang paling krusial adalah membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan berketahanan untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terpisah, termasuk infrastruktur wilayah dan lintas batas. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua. Infrastruktur juga untuk meningkatkan akses industri rumah tangga dan usaha skala kecil lainnya terhadap layanan pendanaan seperti kredit yang terjangkau dan menggabungkan mereka ke dalam pasar dan rantai nilai. Selain itu didahului oleh edukasi pentingnya penguasaan atas teknologi informasi dan komunikasi masa kini dalam melancarkan dan memudahkan segala aktivitas dan transaksi lintas batas, selain penyediaan prasarana bagi akses mereka terhadap internet itu sendiri. Dengan membangun infrastruktur yang berkualitas akan mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi yang kreatif.

Terkait Tujuan 09 SDGs, Marjorie D. Resuello menulis artikel hasil penelitian berjudul “*Hard Infrastructure as Local Economic Development (LED) Enabling Environment in Selected Local Governments in Aichi Prefecture, Japan*”. Dalam tulisannya ia memaparkan bahwa pengembangan ekonomi lokal atau *Local Economic*

Development (LED) muncul untuk membangun kapasitas ekonomi lokal dalam meningkatkan masa depan ekonomi dan kualitas hidup. Dasar rujukan bagi lingkungan yang memungkinkan LED adalah *United Nations Human Settlement Programme, 2005*, mengenai intervensi pemerintah dan penggunaan sumber daya lokal untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Kajian penelitian Resuello adalah mengidentifikasi lingkungan yang memungkinkan LED dalam mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Nagoya, Kota Ichinomiya, dan Kota Kota di Prefektur Aichi, Jepang. Penelitiannya dengan menggunakan metode penelitian observasi partisipan di pemerintah nasional, regional, prefektur, kota, daerah, lembaga akademis dan penelitian, UKM, kamar dagang, asosiasi bisnis, dan komunitas di Prefektur Aichi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah Jepang memberikan dukungan bisnis untuk UKM sebagai kekuatan di balik ekonomi dengan industri UKM yang berkembang pesat. Dukungan terhadap infrastruktur keras diidentifikasi sebagai lingkungan yang memungkinkan LED untuk mendorong keterhubungan, inovasi, dan penciptaan nilai untuk daya tarik UKM, pertumbuhan, dan ekspansi global. Hal ini, menurut Resuell, adalah hal yang umum di antara pemerintah daerah yang dipilih untuk membangun daya saing lokal, menangani pekerjaan dan penciptaan kekayaan, dan mempromosikan kelayakan hidup melalui pembangunan infrastruktur yang sulit. Studi ini layak untuk dilihat oleh negara-negara berkembang, terutama di Wilayah ASEAN, dalam menangani pengurangan kemiskinan dan penciptaan kekayaan.

Selain ketiga artikel kontributor mengenai Tujuan-tujuan SDGs itu, terdapat dua artikel lainnya yang berkontribusi bagi terbitan e-jurnal *Intermestic* Volume 3 nomor 1 kali ini. Dua artikel tersebut adalah mengenai intervensi suatu negara terhadap wilayah lain berdasarkan perlindungan terhadap identitas etnis yang sama, dan terakhir adalah mengenai kepentingan negara dalam pencabutan ekspor senjata.

Artikel mengenai intervensi suatu negara terhadap wilayah lain mengambil fokus konteks konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina dan berakhir dengan lepasnya wilayah Krimea. Rizky Widiasa memberi judul artikelnya itu “*Bingkai Identitas Dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia Di Ukraina*”. Intinya, tulisan Rizky Widiasa adalah jawaban atas pertanyaan yang ingin diungkap dalam tulisannya adalah mengapa suatu identitas yang dimiliki bersama oleh negara dengan negara lainnya dapat digunakan

sebagai isu krusial untuk menjustifikasi tindakan unilateral terhadap negara lain dalam kerangka identitas. Untuk itu Rizky Widiasta memaparkan aksi yang dapat dikategorikan sebagai sebuah intervensi oleh suatu negara, yaitu Rusia, yang mengemukakan alibi dan justifikasi bahwa aneksasinya terhadap Krimea adalah upaya membebaskan wilayah tersebut. Selain itu aksi Rusia itu bertujuan untuk melindungi mayoritas warga etnisnya dari dampak ketidakstabilan politik yang terjadi di Ukraina akibat munculnya gerakan revolusioner. Dengan memandang identitas sebagai pemicu tindakan unilateral, makalah ini secara umum berargumen bagaimana secara historis kesamaan identitas dapat menjadi faktor yang mendukung tindakan opresif yang dilakukan oleh suatu negara dalam meraih ambisi geopolitiknya. Analisis Rizky Widiasta secara khusus menitik beratkan pada faktor kesamaan identitas dari warga Ukraina di Krimea dengan orang-orang Rusia. Namun, kesamaan itu bukanlah hal yang luar biasa mengingat Ukraina sebelumnya adalah bagian dari Uni Soviet. Hanya saja ketika Ukraina semakin menunjukkan kedekatannya dengan Uni-Eropa, Federasi Rusia seolah menampilkan persepsi terancam secara geostrategis oleh NATO (mengingat Ukraina terletak diantara Eropa dengan Federasi Rusia), persamaan identitas dimanfaatkan oleh Rusia untuk melakukan *strategic denial*.

Artikel terakhir pada edisi e-jurnal Intermestic ini adalah hasil penelitian mengenai kepentingan negara dalam pencabutan ekspor senjata yang ditulis oleh Rafyoga Jehan Pratama Irsadana dan Tulus Warsito dengan Judul “*Japan Military Export Ban Lift In 2014 Under Shinzo Abe Administration*” mereka menganalisis mengenai kepentingan Jepang dalam pencabutan larangan ekspor senjata di tahun 2014, meskipun negara tersebut diuntungkan di bawah naungan pasifisme selama tujuh dekade terakhir. Salah satu manifestasi paham pasifis tersebut adalah larangan ekspor senjata parsial (1967) dan total (1976). Dalam menjawab anomali tersebut, artikel ini menggunakan konsep klasik Realisme *Balance of Power* yang dicetuskan oleh Hans Joachim Morgenthau. Dengan kerangka konsep ini, penelitian menemukan bahwa visi utama Shinzo Abe untuk terlibat dalam ekspor dan transfer persenjataan adalah mengimbangi asertifitas Republik Rakyat China di Laut China Timur dengan (1) meningkatkan aliansi militer dan (2) memperkuat kekuatan militer dalam negeri. Hubungan keamanan dengan negara aliansi dipererat dengan mendistribusikan persenjataan kepada negara-negara yang bersengketa dengan Republik Rakyat China dan meningkatkan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Penguatan kekuatan militer internal dapat tercapai karena ekspor militer menstimulus

pengembangan industri militer domestik. Hal tersebut juga memicu pertumbuhan ekonomi dalam program Abenomics, yang juga ditujukan untuk meningkatkan anggaran militer.

Bersamaan dengan publikasi e-jurnal *Intermestic* Volume 3 Nomor 1 kali ini, kami menghaturkan ucapan terimakasih tak terhingga atas kesediaan tiga penelaah sejawat atau mitra bestari (*peer reviewer*) lama dan baru, yaitu: Assoc. Prof. Dr. Ahmad Bashawir bin Hj. Abdul Ghani, University of Northern Malaysia, Malaysia, Dra. Sukawarsini Djelantik, M.A., Ph. D., Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, dan Drs. Abubakar Eby Hara, Ph.D., Universitas Jember, Indonesia. Dengan kepakaran masing-masing dalam ragam ilmu dan konsentrasi khususnya akan memperkuat kredibilitas dan kualitas serta posisi dan arah jurnal ini.

Hormat Kami,

Arry Bainus dan Junita Budi Rachman

Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi